

# OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH BERBASIS PESANTREN DI SMP MUHAMMADIYAH 8 PALANG

*by Nurezi Umsida*

---

**Submission date:** 01-Jan-2024 11:43AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2265931376

**File name:** RPS-OPTIMALISASI\_KEUANGAN\_SEKOLAH\_BERBASIS\_PESANTREN-Revisi.docx (852.38K)

**Word count:** 1073

**Character count:** 7862

## **OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH BERBASIS PESANTREN DI SMP MUHAMMADIYAH 8 PALANG**

### **A. LANDASAN HUKUM**

Peran pendidikan menjadi sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang adaptif, aktual dan siap menghadapi perubahan merupakan salah satu hasil proses pendidikan. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa merupakan pengimbasan dari proses pendidikan[1]. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menetapkan dasar-dasar pengelolaan Pendidikan termasuk pengaturan keuangan di lembaga Pendidikan[2]. Sehingga pembiayaan memiliki unsur penting dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Proses perencanaan pembiayaan dalam satuan Pendidikan tidak terlepas dari administrasi peserta didik untuk operasional sekolah. Dalam meningkatkan dan memajukan kualitas, manajemen pembiayaan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan satuan Pendidikan. Peraturan pemerintah dalam mengatur kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berperan penting demi terciptanya kondisi yang relevan.

Pengelolaan keuangan sekolah merujuk pada serangkaian tindakan yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan sumber daya keuangan yang sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mengatur tentang standar keuangan dan pengelolaan Pendidikan di setiap jenjang[3]. Hal ini menjadi aspek kritis dalam memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan dengan efisien untuk mendukung berbagai kegiatan Pendidikan. Selain itu, mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Sekolah/Madrasah yang merinci prosedur dan tanggungjawab pengelolaan keuangan di tingkat Sekolah/Madrasah, proses tersebut mencakup penyusunan anggaran yang cermat yang mencakup pembiayaan operasional, gaji guru, peralatan dan inisiatif pengembangan sekolah[4].

Pentingnya pemantauan dan evaluasi rutin tidak dapat diabaikan, karena hal ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap anggaran tetapi mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah. Sehingga dalam pengelolaan keuangan sekolah membutuhkan pedoman teknis terkait pengelolaan keuangan di tingkat satuan Pendidikan sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.03.2009[5].

Persyarikatan Muhammadiyah sebagai induk organisasi yang juga sebagai penanggungjawab serta penyelenggara mengatur pola keuangan yang ada di lembaga pendidikan, bahwa pengelolaan sekolah, madrasah, dan pesantren Muhammadiyah harus dilakukan secara optimal, efisien, transparan, dan akuntabel[6]. Dengan adanya pedoman pengelolaan keuangan tersebut maka diharapkan SMP Muhammadiyah 8 Palang Berbasis Pesantren dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menjaga akuntabilitas, dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara efektif.

### **B. ANALISIS INTERNAL DAN EKSTERNAL INTERNAL**

Kewenangan regulasi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi

keuangan satuan pendidikan. Misalnya, peraturan tentang besaran dana operasional per siswa atau perubahan kebijakan pajak sehingga sangat berdampak secara langsung terhadap satuan pendidikan. Oleh sebab itu, supaya terhindar dari aspek kondisi keuangan yang kurang relavan satuan pendidikan diharapkan mampu mengikuti perkembangan peraturan pemerintah. Kegiatan pembiayaan pendidikan secara keseluruhan yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, mengelola, mengevaluasi dan transparan bertanggungjawab secara efektif dalam penyelenggaraan satuan pendidikan, sehingga potensi keuangan sangat menentukan bagian yang tidak terpisahkan dalam manajemen pendidikan[7]. Pembiayaan dalam pendidikan menjadi peran yang penting dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah, karena dengan pembiayaan tersebut berbanding lurus dengan pencapaian dan tujuan Lembaga pendidikan[8]. Pengelolaan keuangan di Lembaga pendidikan berbasis pesantren tidak lepas dari berbagai problematika. Lemahnya SDM pengurus, dana operasional yang minim, keuangan yang tidak transparansi, dan pengeluaran dana yang *isidentil*. Hal ini yang menjadi satu diantara beberapa sebab lembaga berbasis pesantren tidak optimal dalam pengelolaan keuangan[9]. Pengelolaan manajemen keuangan di lembaga pendidikan SMP Muhammadiyah 8 Palang berbasis Pesantren secara idealnya harus sesuai dengan rencana kegiatan anggaran sekolah namun, realita yang terjadi hampir setiap bulan operasional satuan pendidikan selalu mengalami *liabilitas* dan tidak sesuai dengan yang direncanakan dalam rencana kegiatan anggaran sekolah. Hal tersebut dikarenakan berbagai faktor antara lain :

1. Manajemen keuangan yang belum terakomodir dalam sebuah sistem
2. Pendapatan keuangan yang tidak stabil
3. Lembaga belum memiliki sumber pendapatan lainnya
4. Pesantren belum memiliki rencana kegiatan dan anggaran
5. Pengeluaran keuangan lebih besar daripada pendapatan, kurangnya kepekaan stakeholder dalam keterlibatan pengelolaan lembaga

#### **EKSTERNAL**

Faktor ekonomi merupakan salah satu peran yang penting dalam menganalisis keuangan yang ada di satuan pendidikan. Kondisi ekonomi yang tidak menentu (*Fluktuatif*) mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran satuan pendidikan[10]. Di SMP Muhammadiyah 8 Palang berbasis Pesantren secara geografis terletak di daerah pesisir dan semi pedalaman dimana mayoritas masyarakat masih bergantung dari hasil laut dan hasil bumi. Atau dalam statistik masih tergolong masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketidakmampuan atau kesulitan ekonomi sehingga berdampak pada ketuntasan kewajiban pembayaran pembiayaan pendidikan di SMP Muhammadiyah 8 Palang berbasis Pesantren. Oleh karena itu, sekolah perlu memahami kondisi perekonomian yang sedang berlangsung agar dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengelola keuangan.

#### **C. TUJUAN RENCANA PENGEMBANGAN**

Menganalisis permasalahan yang terjadi pada pengelolaan keuangan SMP Muhammadiyah 8 Palang Berbasis Pesantren sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengembangan keterampilan keuangan kepada seluruh *stakeholder*, staf pengelola sekolah untuk memastikan pemahaman yang baik tentang manajemen keuangan

2. Meningkatkan pendapatan sekolah
3. Meningkatkan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah beserta Pesantren
4. Meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pengelolaan keuangan sekolah, termasuk melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran dan program pendidikan.

Dengan mengoptimalkan tujuan rencana pengembangan diatas diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pendidikan di SMP Muhammadiyah 8 Palang Berbasis Pesantren melalui pengelolaan keuangan yang efektif dan berkelanjutan.

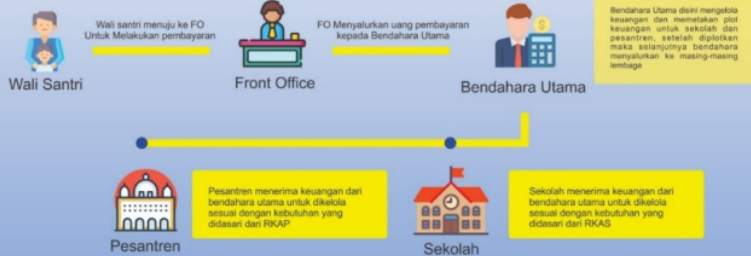
#### D. CARA PENCAPAIAN PENGEMBANGAN

Pencapaian pengembangan pengelolaan keuangan di SMP Muhammadiyah 8 Palang yang berbasis pesantren dapat dicapai sebagai berikut:



**STEP 3** | PEDOMAN SISTEM KEUANGAN  
SEKOLAH BERBASIS PESANTREN

**ALUR KEUANGAN**



Alur Keuangan satu pintu seperti ilustrasi diatas dibuat untuk memanage keuangan secara rapi dan administratif disisi lain juga menghindari kesalahpahaman antara sekolah dan pesantren, karena masing-masing lembaga memiliki rencana kegiatan dan anggarannya masing-masing, jika dicampur-adukkan maka biasanya yang terjadi adalah clash antar lembaga.

Gambar Ilustrasi oleh Nurezi Kurnia Sandy

**STEP 4** | PEDOMAN SISTEM KEUANGAN  
SEKOLAH BERBASIS PESANTREN

**MASALAH/SOLUSI KEUANGAN**

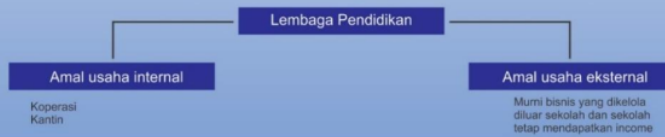
Dari instrumen yang sudah dijelaskan mulai dari tahapan pertama sampai terakhir maka biasanya yang muncul adalah masalah keuangan, beberapa masalah yang sangat sering muncul di lembaga pendidikan diantaranya lain:

SPP belum terbayar

Keuangan Tidak Balance

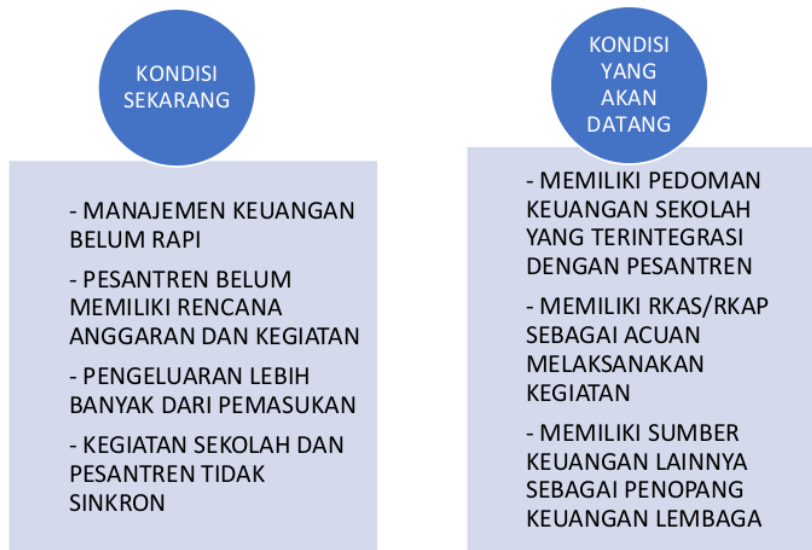
Pengeluaran lebih banyak

Gambaran masalah umum yang ada didunia pendidikan seperti diatas pada akhirnya memunculkan beberapa opsional dari pengelola lembaga pendidikan itu sendiri, yang saat ini akan kita bahas adalah tentang menambah sumber keuangan lainnya, umumnya kalau kita bicara tentang hal ini secara umum gambaran kita adalah koperasi sekolah dan kantin sekolah, apakah hal tersebut salah? Tidak, akan tetapi masih belum mencukupi untuk menopang pembiayaan yang kurang, harusnya ada evolusi tersebut, ilustrasinya seperti ini



Gambar Ilustrasi oleh Nurezi Kurnia Sandy

## E. KEBARUAN PENGEMBANGAN



## F. REFRENSI

- [1] A. L. B. Masalah, "Peran Pendidikan," 1989.
- [2] "Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional," *Zitteliana*, vol. 19, no. 8, pp. 159–170, 2003.
- [3] Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia," *Sekr. Negara*, pp. 1–54, 2005, [Online]. Available: [https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/PP\\_tahun2005\\_nomor19\(Standar Nasional Pendidikan\).pdf#:~:text=%284%29 Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat,dari satuan pendidikan nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.](https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/PP_tahun2005_nomor19(Standar%20Nasional%20Pendidikan).pdf#:~:text=%284%29%20Pendidikan%20kecakapan%20hidup%20sebagaimana%20dimaksud%20pada%20ayat,dari%20satu%20pendidikan%20nonformal%20yang%20sudah%20memperoleh%20akreditasi.)
- [4] M. Pendidikan, D. A. N. Kebudayaan, and R. Indonesia, "Peraturan pemerintah menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 58 tahun 2014 tentang kurikulum 2013," p. 16, 2018, [Online]. Available: [jdih.kemdikbud.go.id](http://jdih.kemdikbud.go.id)
- [5] Keuangan.go.id, "PMK Nomor 96 Tahun 2009 Tentang JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA," pp. 20–22, 2021, [Online]. Available: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/96~PMK.03~2009PerLamp.pdf>
- [6] P. P. Muhammadiyah, "Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah," no. 62, pp. 91–99, 2017, [Online]. Available: <https://dikdasmenppmuhammadiyah.org/wp-content/uploads/2020/02/Ketentuan-Dik-PP-Nomor-100-KTN-I.4-F-2017-Kepegawaian-pada-Sekolah-Madarasah-dan-Pesantren-Muhammadiyah.pdf>
- [7] G. Adillah, "Manajemen Keuangan Sekolah," *Manajer Pendidik.*, vol. 10, no. 4, pp. 343–346, 2016.
- [8] X. D. Crystallography, "Analisis Konsep Manajemen Keuangan Sekolah," pp. 1–23, 2016.
- [9] A. T. Suryana, "Pengelolaan Keuangan Pesantren," *Al - Mujaddid J. Ilmu-ilmu Agama*, vol. 2, no. 2, pp. 1–8, 2020, doi: 10.51482/almujaddid.v2i2.42.
- [10] A. Widiyansyah, "Peran ekonomi dalam pendidikan dan pendidikan dalam pembangunan ekonomi," *Cakrawala-Jurnal Hum.*, vol. 17, no. 2, pp. 207–215, 2017.



# OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH BERBASIS PESANTREN DI SMP MUHAMMADIYAH 8 PALANG

## ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[ejournal.upi.edu](http://ejournal.upi.edu)

Internet Source

3%

2

[eprints.iain-surakarta.ac.id](http://eprints.iain-surakarta.ac.id)

Internet Source

2%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On